



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Enriching the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

KEGIATAN
MS V Tahun Sidang 2021-2022
(31 Mei – 13 Juni 2022)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SENERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

f 20/0/22

DAFTAR ISI

KOMISI II	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	2
C. FUNGSI PENGAWASAN	13
D. TUGAS KHUSUS	14
KOMISI III	15
A. FUNGSI LEGISLASI	15
B. FUNGSI ANGGARAN	15
C. FUNGSI PENGAWASAN	19
KOMISI IV	20
A. FUNGSI LEGISLASI	20
B. FUNGSI ANGGARAN	20
C. FUNGSI PENGAWASAN	20
KOMISI V	22
A. FUNGSI LEGISLASI	22
B. FUNGSI ANGGARAN	22
C. FUNGSI PENGAWASAN	26

KOMISI VI	27
A. FUNGSI LEGISLASI	27
B. FUNGSI ANGGARAN	27
C. FUNGSI PENGAWASAN	27
KOMISI VII	33
A. FUNGSI LEGISLASI	33
B. FUNGSI ANGGARAN	33
C. FUNGSI PENGAWASAN	36
KOMISI VIII	37
A. FUNGSI LEGISLASI	37
B. FUNGSI ANGGARAN	37
C. FUNGSI PENGAWASAN	38
KOMISI IX	39
A. FUNGSI LEGISLASI	39
B. FUNGSI ANGGARAN	39
C. FUNGSI PENGAWASAN	40

KOMISI X	43
A. FUNGSI LEGISLASI	43
B. FUNGSI ANGGARAN	43
C. FUNGSI PENGAWASAN	46
KOMISI XI	47
A. FUNGSI LEGISLASI	47
B. FUNGSI ANGGARAN	47
C. FUNGSI PENGAWASAN	48
BADAN LEGISLASI	49
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	50
BADAN ANGGARAN	59
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	61
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	64

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	5 (lima) RUU tentang Provinsi, yaitu: Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT	a. Penyusunan b. Pembahasan c. Harmonisasi; d. Prolegnas; e. Pemantauan & peninjauan	Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Provinsi Sumatera Bara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 5 (lima) RUU Provinsi tersebut, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja	<p>1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pendapat/pandangan dari Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite I DPD RI terhadap 5 (lima) RUU tentang Provinsi (Sumatera Barat, Riau, Jambi, NTB, dan NTT).</p> <p>2. Pemerintah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.</p> <p>3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan 5 (lima) RUU tentang Provinsi (Sumatera Barat, Riau, Jambi, NTB, dan NTT).</p>

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden	Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat	Agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023	<p>1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023:</p> <p>a. Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp2.273.694.346.000,- (<i>dua triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah</i>), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Kantor Staf Presiden (KSP) sebesar Rp122.150.572.000,- (<i>seratus dua puluh dua miliar seratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah</i>);</p> <p>b. Sekretariat Kabinet sebesar Rp352.292.228.000,- (<i>tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah</i>);</p> <p>Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.</p> <p>2. Terhadap usulan pengalihan anggaran per program Sekretariat Kabinet dari program Penyelenggaraan Layanan</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>kepada Presiden dan Wakil Presiden ke program Dukungan Manajemen sebesar Rp12.046.603.000,- (<i>dua belas miliar empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu rupiah</i>) untuk mengakomodir kebutuhan anggaran integrasi sistem informasi, Komisi II DPR RI akan mem bahas nya secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2023 yang akan datang.</p> <p>3. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian hasil realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 sebagai berikut:</p> <p>a. Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp548.806.192.677,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp1.957.037.718.000,- atau sebesar 28.04%, sudah termasuk di dalamnya realisasi anggaran tahun 2022 Kantor Staf Presiden sebesar Rp37.302.319.112,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp105.784.896.000,-.</p> <p>b. Sekretariat Kabinet sebesar Rp135.179.670.956,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2022</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>sebesar Rp326.315.931.000,- atau 41.43%.</p> <p>Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2022 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Jumat, 10 Juni 2022, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2023 yang akan datang.</p>
2.	<p>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN)</p>	Rapat Kerja	Agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023	<p>1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebesar Rp7.490.840.652.000,- (<i>tujuh triliun empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah</i>), dan akan mem bahas nya secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.</p> <p>2. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian hasil realisasi anggaran</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>Kementerian ATR/BPN tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar Rp2.060.832.082.000,- (<i>dua triliun enam puluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan puluh dua ribu rupiah</i>) atau sebesar 27,00% dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp7.630.765.107.000,- (<i>tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah</i>).</p> <p>3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2022 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan realisasi capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Jumat, 10 Juni 2022, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2023 yang akan datang.</p>
3.	<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Badan Kepegawaian Negara RI, Lembaga</p>	<p>Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat</p>	<p>Agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023</p>	<p>1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023:</p> <p>a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebesar Rp281.843.164.000,- (<i>dua</i></p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Administrasi Negara RI, Komisi Aparatur Sipil Negara RI, Arsip Nasional RI, dan Ombudsman RI.			<p><i>ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar Rp54.756.718.000,- (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);</i></p> <p>b. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar Rp585.409.844.000,- (lima ratus delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);</p> <p>c. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar Rp308.012.174.000,- (tiga ratus delapan miliar dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);</p> <p>d. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar Rp259.414.701.000,- (dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus satu ribu rupiah);</p> <p>e. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebesar Rp234.047.920.000,-</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p><i>(dua ratus tiga puluh empat miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).</i></p> <p>Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.</p> <p>2. Mengingat ruang lingkup pembahasan sangat luas maka usulan tambahan anggaran dan usulan penyesuaian anggaran/pergeseran alokasi anggaran per program RAPBN Tahun 2023 yang diusulkan Kementerian PANRB, BKN RI, KASN RI, LAN RI, ANRI, dan ORI, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2023 yang akan datang.</p> <p>3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB, BKN, LAN, KASN, ANRI, dan ORI untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2022 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Jumat, 10 Juni 2022, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2023 yang akan datang.</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI	Rapat Dengar Pendapat	Agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023	<p>1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) sebesar Rp15.987.872.001.000,- (<i>lima belas triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seribu rupiah</i>), dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.</p> <p>2. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU RI:</p> <p>a. Untuk memenuhi kekurangan anggaran tahun 2023 sebesar Rp7.869.445.225.000,- (<i>tujuh triliun delapan ratus enam puluh puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah</i>);</p> <p>b. Untuk memenuhi kekurangan anggaran tahun 2022 sebesar Rp5.608.119.929.000,- (<i>lima triliun enam ratus delapan miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah</i>);</p> <p>Komisi II DPR RI akan membahas secara mendalam kedua poin tersebut</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.</p> <p>3. Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian hasil realisasi anggaran tahun 2022 KPU RI sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar Rp760.200.236.534,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp2.329.543.182.000,- atau sebesar 32.63%.</p> <p>4. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) sebesar Rp7.103.821.817.000,- (<i>tujuh triliun seratus tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah</i>), dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.</p> <p>5. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu RI:</p> <p>a. Untuk memenuhi kekurangan anggaran tahun 2023 sebesar Rp6.069.464.311.000,- (<i>enam triliun enam puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah</i>);</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>b. Untuk memenuhi kekurangan anggaran tahun 2022 sebesar Rp1.718.399.533.000,- (<i>satu triliun tujuh ratus delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah</i>); Komisi II DPR RI akan membahas secara mendalam kedua poin tersebut pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.</p> <p>6. Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian hasil realisasi anggaran tahun 2022 Bawaslu RI sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar Rp607.175.670.474,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp1.982.860.804.000,- atau sebesar 30.62%.</p> <p>7. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2022 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga), serta alokasi anggaran pemilu serentak tahun 2019 beserta realisasinya kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Jum'at, 10 Juni 2022, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2023 yang akan datang.</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Kementerian Dalam Negeri RI/BNPP, DKPP, dan BPIP	Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat	Agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023	<p>1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023:</p> <p>a. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp2.909.934.017.000,- (<i>dua triliun sembilan ratus sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah</i>), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp26.100.000.000,- (<i>dua puluh enam miliar seratus juta rupiah</i>);</p> <p>b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp230.141.319.000,- (<i>dua ratus tiga puluh miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah</i>);</p> <p>c. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebesar Rp357.496.465.000,- (<i>tiga ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah</i>);</p> <p>Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>2. Terhadap usulan kebutuhan anggaran DKPP dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 akan dibahas secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.</p> <p>3. Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian hasil realisasi anggaran tahun 2022 BPIP sampai dengan 6 Juni 2022 sebesar Rp138.512.146.019,- (<i>seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus dua belas juta seratus empat puluh enam ribu sembilan belas rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp310.453.749.000,- (<i>tiga ratus sepuluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah</i>) atau sebesar 44.62%.</p> <p>4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri, DKPP, dan BNPP menyampaikan hasil realisasi anggaran tahun 2022 kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Jumat, 10 Juni 2022, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2023 yang akan datang.</p> <p>5. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri, DKPP, BNPP, dan BPIP</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2022 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Jumat, 10 Juni 2022, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2023 yang akan datang.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Dalam Negeri RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. 	Melakukan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membicarakan Rancangan Peraturan KPU	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri menyetujui rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. 2. Demi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024, Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 termasuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				pengadaan barang/jasa khusus Pemilu; juga kegiatan kelancaran pendistribusian logistik Pemilu 2024.
2.	Pemerintah Daerah Kab. Simalungun dan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, dan Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka sinkronisasi data kependudukan dan data pemilih di Kab. Simalungun dan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, dan Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.	Membahas sinkronisasi data kependudukan dan data pemilih.

D. TUGAS KHUSUS

1. Mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas keputusan berdasarkan mufakat;
2. Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar;
3. Persetujuan pemindahtanganan aset negara;
4. Persetujuan perjanjian internasional yang berdampak luas;
5. Pemilihan anggota BPK;
6. Penegakan kode etik;
7. Kerja sama antar parlemen;
8. Akuntabilitas keuangan;
9. Kerumahtangaan DPR RI

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut dengan RUU tentang HAPER)	Rapat Dengar Pendapat Umum	Komisi III DPR RI melakukan RDPU dengan beberapa narasumber guna mendapatkan masukan terkait pelaksanaan hukum acara perdata oleh para advokat, yaitu: pada tanggal 2 Juni 2022, RDPU dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kepengurusan Luhut MP Pangaribuan.	---
2.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan RUU tentang Narkotika)	---	Pada tanggal 30 Mei sd 10 Juni 2022, Komisi III belum melakukan kegiatan pembahasan RUU tentang Narkotika.	---

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BNPT	Rapat Kerja (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 30 Mei 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				3. Dihadiri oleh Kepala BNPT dan jajaran.
2.	Komisi Yudisial RI	Rapat Dengar Pendapat (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan.	1. RDP dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 30 Mei 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. 3. Dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan jajaran.
3.	LPSK	Rapat Kerja (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 31 Mei 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 3. Dihadiri oleh Ketua LPSK dan jajaran
4.	PPATK	Rapat Kerja (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 31 Mei 2022. 2. Dipimpin oleh Ketua Komisi III, Bp. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. 3. Dihadiri oleh Kepala PPATK dan jajaran
5.	BNN RI	Rapat Kerja (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 2 Juni 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. 3. Dihadiri oleh Kepala BNN RI dan jajaran

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Mahkamah Agung RI	Rapat Dengar Pendapat (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. RDP dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 2 Juni 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 3. Dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dan jajaran.
7.	Kemenkumham RI	Rapat Kerja (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 6 Juni 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp. H. Desmond Junaedi Mahesa, S.H., M.H. 3. Dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI dan jajaran
8.	MPR RI	Rapat Dengar Pendapat (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RDP dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 6 Juni 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. 3. Dihadiri oleh Sekretaris Jenderal MPR RI dan jajaran.
9.	Mahkamah Konstitusi RI	Rapat Dengar Pendapat (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RDP dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 7 Juni 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 3. Dihadiri oleh Sekretaris Jenderal MK RI dan jajaran

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
10.	DPD RI	Rapat Dengar Pendapat (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RDP dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 7 Juni 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 3. Dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPD RI dan jajaran.
11.	POLRI	Rapat Kerja (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 8 Juni 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. 3. Dihadiri oleh Kapolri dan jajaran
12.	KPK	Rapat Kerja (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 8 Juni 2022. 2. Dipimpin oleh Ketua Komisi III, Bp Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. 3. Dihadiri oleh Ketua KPK dan jajaran
13.	Kejaksaan RI	Rapat Kerja (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 9 Juni 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. 3. Dihadiri oleh Jaksa Agung dan jajaran

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
14.	Komnas HAM RI	Rapat Kerja (TERTUTUP)	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 beserta Usulan Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 9 Juni 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp H. Desmond Junaedi Mahesa, S.H., M.H. 3. Dihadiri oleh Ketua Komnas HAM dan jajaran 4. Dihadiri pula Ketua Komnas Perempuan dan jajaran.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2. Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta. 3. Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur. 	Kunjungan Spesifik Fungsi Pengawasan	Kunspek ke 3 (tiga) daerah, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Juni 2022 dalam rangka evaluasi pengamanan arus mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2022.	---
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 2. Kantor Imigrasi Batam. 3. Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 	Kunjungan Spesifik Fungsi Pengawasan	Kunspek ke 2 (dua) daerah, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sulawesi Selatan, dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 12 Juni 2022 dalam rangka evaluasi pengamanan arus mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2022.	---

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Pertanian (Menteri dan 11 Eselon I)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023; dan b. Isu-isu Aktual Lainnya.	
2.	Kementerian Pertanian (11 Eselon I)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	Pendalaman RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023	
3.	Kementerian Pertanian (Menteri dan 11 Eselon I)	a. Pelakasanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023	
4.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri dan 13 Eselon I) serta Kepala Badan	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023; dan b. Isu-isu Aktual Lainnya.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Restorasi Gambut dan Mangrove			
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Menteri dan 9 Eselon I)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023; dan b. Isu-isu Aktual Lainnya.	
6.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (9 Eselon I)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; d. Kebijakan Pemerintah	Pendalaman RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ	Rapat Dengar Pendapat Umum	Mendengarkan masukan pakar terkait Sistem Transportasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - RDPU dilaksanakan secara fisik dan Virtual, pada tanggal 13 Juni 2022 dengan pakar B. Alvin Lie - RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Bp. Ridwan Bae.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Rapat Kerja (Terbuka) pada tanggal 30 Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian hasil KunKer KOMISI V DPR RI - Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2023 - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Raker dilaksanakan secara Fisik dan Virtual. - Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Bp. Ridwan Bae - Dihadiri oleh Menteri KemeDes, PDT dan Transmigrasi beserta jajaran

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	BMKG dan BNPP (BASARNAS)	Rapat Dengar Pendapat (Terbuka) pada tanggal 31 Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian hasil KunKer KOMISI V DPR RI - Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2023 - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - RDP dilaksanakan secara Fisik dan Virtual. - Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Bp. Syaifullah Tamliha - Dihadiri oleh Kepala BMKG beserta jajaran dan Kepala BNPP (Basarnas) beserta jajaran
3.	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Rapat Dengar Pendapat (Terbuka) pada tanggal 2 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Mei 2022; - Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2023 masing-masing Unit Eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> - RDP dilaksanakan secara Fisik dan Virtual pukul 10:00-13:00 wib - Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Bp. Syaifullah Tamliha - RDP diahdiri oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 4. Kepala Badan Pengembangan Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> - RDP dilaksanakan secara Fisik dan Virtual pukul 14:00-17:00 wib - Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Bp. Syaifullah Tamliha - RDP diahdiri oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Pembangunan Desa Dan Perdesaan; 2. Dirjen Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi; 3. Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 4. Dirjen Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4.	Kementerian Perhubungan	Rapat Kerja (Terbuka) pada tanggal 7 Juni dan 8 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian hasil KunKer Komisi V DPR RI - Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2023 - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Raker dilaksanakan secara Fisik dan Virtual. - Raker dipimpin oleh Ketua Komisi V Bp. Lasarus - Dihadiri oleh Menteri Perhubungan beserta jajaran - RDP dilaksanakan secara Fisik dan Virtual pukul 10:00-13:00 wib

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> - RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Bp.Syaifullah Tamliha dan Bp. Andi Iwan D. Aras - RDP Dihadiri oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Perhubungan Darat (turut menghadirkan secara virtual Kabalai Pengelola Transportasi Darat seluruh Indonesia) 2. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek - RDP dilaksanakan secara Fisik dan Virtual pukul 14:00-17:00 wib - RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Bp. Andi Iwan D. Aras - RDP Dihadiri oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Perhubungan Laut (turut menghadirkan secara virtual Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I dan Kelas II) 2. Dirjen Perkeretaapian (turut menghadirkan secara virtual Kabalai Teknik Perkeretaapian seluruh Indones

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rapat Kerja (Terbuka) pada tanggal 9 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian hasil KunKer KOMISI V DPR RI - Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2023 - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Raker dilaksanakan secara Fisik dan Virtual. - Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Bp. Ridwan Bae - Dihadiri oleh Menteri PUPR beserta jajaran

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kabupaten Manggarai Timur - NTT	–	Audiensi Bupati Manggarai Timur dan Wakil Ketua II DPRD Manggarai timur beserta jajaran	- Audiensi dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022 secara Fisik.
2.	Kementrian PUPR	Kunjungan Spesifik	Meninjau : 1. Sodedan Puncak, Kab. Bogor, Jabar; 2. <i>Flyover</i> Kopo dan Rencana <i>Flyover</i> Buah Batu, Kota Bandung, Jabar; 3. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sitanala, Kota Tangerang, Banten;	- Kunsfik dilaksanakan tanggal 3-5 Juni 2022
3	DPRD Kabupaten Soppeng - Sulsel	–	Audiensi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng beserta jajaran	- Audiensi dilaksanakan pada tanggal 6 juni 2022 secara Fisik.
4.	DPRD Kabupaten Tebo - Jambi	–	Audiensi Anggota DPRD Kabupaten Tobe beserta jajaran	- Audiensi dilaksanakan pada tanggal 7 juni 2022 secara Fisik.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BP BATAM	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI meyetujui pagu indikatif BP Batam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp1.722.948.329.000,- (Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian program Dukungan Manajemen sebesar Rp858.169.534.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp864.778.795.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Senin 6 Juni 2022

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 yang diajukan Kepala BP Batam sebesar Rp386.000.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Rupiah) dalam bentuk Rupiah Murni untuk dapat mendanai kegiatan Prioritas Nasional di BP Batam.</p>	
2.	BPKS Sabang	<p>a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah</p>	<p>Komisi VI DPR RI meyetujui pagu indikatif BPKS Sabang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp66.527.592.000,- (Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni Sebesar Rp63.857.592.000,- (Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Badan Layanan Umum BPKS sebesar Rp2.670.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 yang diajukan Plt. Kepala BPKS Sabang sebesar Rp48.774.168.000,- (Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dalam bentuk Rupiah Murni untuk dapat mendanai program pengembangan strategis BPKS Sabang Tahun 2023.</p>	<p>Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang), Senin 6 Juni 2022</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	KPPU	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<p>Komisi VI DPR RI meyetujui pagu indikatif KPPU Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp100.814.783.000 (Seratus Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 yang diajukan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp129.269.272.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk dapat mendanai kegiatan Prioritas di KPPU.</p>	<p>Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Senin 6 Juni 2022</p>
4.	Kementerian Perdagangan RI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<p>Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp2.140.206.191.000 (Dua Triliun Seratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp459.661.160.000 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk dapat mendukung pencapaian target kinerja 2023. Selain itu, Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan RI agar melakukan optimalisasi pengawasan distribusi dan pengendalian harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya di seluruh wilayah Indonesia hingga sesuai dengan HET.</p>	<p>Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI, Selasa, 7 Juni 2022.</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Kementerian BUMN RI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<p>Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian BUMN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp232.004.494.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp79.700.000.000 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) untuk dapat mendukung pencapaian target kinerja 2023. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara Tunai dan Non Tunai tahun 2023. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami inisiatif Corporate Action.</p>	<p>Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI, Selasa, 7 Juni 2022.</p>
6.	Kementerian Koperasi dan UKM RI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<p>Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2023 sebesar Rp1.287.517.242.000 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2023 sebesar Rp1.233.885.556.000 (Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Selain itu, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dan untuk selanjutnya akan mendalami Usulan Lanjutan Program BPUM dengan target 12,8 juta penerima berdasarkan 212 Wilayah</p>	<p>Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI, Rabu 8 Juni 2022.</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Kemiskinan Ekstrem, masing-masing penerima mendapatkan Rp600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah). Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI mendesak Satgas Koperasi Bermasalah melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk lebih intens dan serius, dalam menangani permasalahan koperasi-koperasi yang bermasalah di lapangan, jika diperlukan dilakukan penindakan tegas. Komisi VI DPR RI menyetujui agar Usulan Alokasi Pendanaan KUMKM sebesar Rp374.662.893.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagian direalokasikan untuk peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi.	
7.	Badan Standardisasi Nasional RI	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Badan Standardisasi Nasional RI Tahun 2023 sebesar Rp198.285.122.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Selain itu, Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Badan Standardisasi Nasional RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional RI, Rabu 8 Juni 2022
8.	Kementerian Investasi/BKPM RI	a. Pelaksanaan Undang-Undang;	Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2023 sebesar Rp646.016.145.000 (Enam Ratus Empat Puluh	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepal

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Enam Miliar Enam Belas Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) . Komisi VI DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.240.593.724.000 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang akan dialokasikan untuk mendanai program prioritas dalam meningkatkan investasi pada tahun 2023.	a Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM), Jumat, 10 Juni 2022.
9.	Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) terkait Kepailitan PT Kertas Leces (Persero). Komisi VI DPR RI akan memanggil kurator yang menangani Kapailitan PT Kertas Leces (Persero) tanpa mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas.	Rapat Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI dengan Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan	Rapat Intern	Persetujuan hasil harmonisasi Rancangan Undang-undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	Penyampaian Surat ke Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Nomor B/10726/LG.01.01/6/2022 tanggal 7 Juni 2022 Perihal: Permintaan penjadwalan dalam Rapat Paripurna DPR RI Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah tanggal 9 Juni 2022 diputusan: - Dijadwalkan dalam Rapat Paripurna pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) b. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (ASPERMIGAS),	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Performa penerimaan Badan Usaha sektor Hulu Migas pada Tahun 2022 dan target Tahun 2023 b. Progress Lifting Migas Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 c. Proyeksi ICP Tahun 2023	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	c. Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)		d. Potensi dan Eksplorasi cadangan baru Migas e. Lain-lain	
2.	Direktur Utama PT Pertamina (Persero)	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Realisasi Kuota BBM dan LPG bersubsidi Tahun 2022 dan proyeksi kuota Tahun 2023 b. Lain-lain	
3.	Direktur Utama PT PLN (Persero)	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Strategi subsidi listrik tepat sasaran Tahun 2023 sebagai upaya akselerasi penggunaan energi bersih di masyarakat b. Lain-lain	
4.	Dirjen Ketengalistrikan Kementerian ESDM RI	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Strategi subsidi listrik tepat sasaran Tahun 2023 sebagai upaya peningkatan rasio elektrifikasi b. Lain-lain	
5.	a. Sekjen b. Dirjen Ketenagalistrikan c. Dirjen EBTKE d. Kepala BPSDM Kementerian ESDM	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Progress pelaksanaan kegiatan TA. 2022	
6.	a. Sekjen DEN b. Kepala Badan Geologi	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara;	Progress pelaksanaan kegiatan TA. 2022	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	c. Kepala Balitbang ESDM Kementerian ESDM	c. Kebijakan Pemerintah		
7.	a. Dirjen Migas b. Kepala BPH c. Irjen d. BPMA Kementerian ESDM	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Progress pelaksanaan kegiatan TA. 2022	
8.	a. Kepala BRIN b. Kepala BAPETEN c. Kepala BIG	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Progress pelaksanaan kegiatan TA. 2022	
9.	Dirjen Minerba Kementerian ESDM	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Progress pelaksanaan kegiatan TA. 2022	
10	a. Sekjen b. Dirjen IKMA c. Dirjen Industri Agro d. Dirjen IKFT e. Dirjen ILMTE	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Progress pelaksanaan kegiatan TA. 2022	
11.	a. Dirjen KPAII b. Kepla BSKJI c. Kepala BPSDM Industri d. Irjen	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Progress pelaksanaan kegiatan TA. 2022	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Dirut MIND ID, b. Dirut PT Antam, Tbk. c. Dirut PT Vale Indonesia, Tbk.	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Progress dan Target Kinerja PT Vale Indonesia, Tbk. b. Progres Pembangunan Industri Baterai Untuk Komponen <i>Electric Vehicle</i> c. Dan lain-lain.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI	Rapat Kerja Pembicaraan Pendahuluan APBN 2023	Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu indikatif Kementerian Agama RI tahun 2023 sebesar Rp69.010.639.547.000,- (<i>Enam Puluh Sembilan Triliun Sepuluh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah</i>).	-
2.	Kementerian Sosial RI	Rapat Kerja Pembicaraan Pendahuluan APBN 2023	Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu indikatif Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp78.179.586.686.000,- (<i>Tujuh Puluh Delapan Triliun Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah</i>).	
3.	Kementerian PPPA	Rapat Kerja Pembicaraan	Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu indikatif Kementerian PPPA Tahun Anggaran 2023 sebesar	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Pendahuluan APBN 2023	Rp263.403.485.000 (<i>Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar, Empat Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima ribu rupiah</i>).	
4.	BNPB	Rapat Kerja Pembicaraan Pendahuluan APBN 2023	Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu indikatif BNPB Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp994.186.769.000,- (<i>Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah</i>).	
5.	Dirjen PHU Kementerian Agama RI	Usul penambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M	Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui usulan Menteri Agama RI mengenai tambahan anggaran operasional haji reguler pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M sebesar Rp 1.536.637.849.087,- (<i>Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah</i>) meliputi biaya masyair jamaah haji reguler, biaya technical landing jamaah embarkasi Surabaya dan selisih kurs kontrak penerangan.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Panja menugaskan tim asistensi untuk mempersiapkan pendalaman substansi RUU sesuai masukan anggota Panja.	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kegiatan Panja 	Panja akan melakukan pembahasan draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Masa Persidangan V TS 2021-2022.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BKKBN RI	Pembahasan RKA-K/L & RKP Tahun 2023	Rapat bersifat tertutup	Tanggal 6 Juni 2022 Rapat Dengar Pendapat
2.	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Pembahasan RKA-K/L & RKP Tahun 2023	Rapat bersifat tertutup	Tanggal 7 Juni 2022 Rapat Dengar Pendapat

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Badan POM RI	Pembahasan RKA-K/L & RKP Tahun 2023	Rapat bersifat tertutup	Tanggal 8 Juni 2022 Rapat Dengar Pendapat
4.	BP2MI	Pembahasan RKA-K/L & RKP Tahun 2023	Rapat bersifat tertutup	Tanggal 8 Juni 2022 Rapat Dengar Pendapat
5.	Kementerian Kesehatan RI	Pembahasan RKA-K/L & RKP Tahun 2023	Rapat bersifat tertutup	Tanggal 9 Juni 2022 Rapat Kerja

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pengawasan Vaksin COVID-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan rencana penggunaan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri. 2. Pemenuhan kebutuhan vaksin COVID-19 halal. 3. Dukungan kebijakan dan pembiayaan terhadap vaksin COVID-19 halal dan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri. 	Komisi IX DPR RI menerima dan mengapresiasi masukan dari semua pihak yang diundang, selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Panja Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Vaksin COVID-19 dalam menyusun laporan akhir panja.	Rapat Panja Tanggal 31 Mei 2022

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Masyarakat Farmasi Indonesia (MFI).	Masyarakat Farmasi Indonesia (MFI) berkeinginan agar RUU Kefarmasian segera masuk prolegnas prioritas.	Komisi IX DPR RI menerima dan mengapresiasi masukan dari Masyarakat Farmasi Indonesia (MFI).	Audiensi Tanggal 8 Juni 2022
3.	Kepala BP2MI, Duta Besar RI untuk Malaysia, Pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Penempatan PMI (<i>cost structure</i>) 2. Biaya Asuransi PMI di luar BPJS Ketenagakerjaan 3. Evaluasi terhadap Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan oleh BP2MI 4. Penjelasan dan tindak lanjut atas gagal berangkatnya 147 orang calon PMI asal Provinsi NTB ke Negara Malaysia 5. Kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Penempatan Calon PMI/PMI di seluruh sektor khususnya sektor perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendesak BP2MI untuk melaksanakan penempatan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam negeri dan negara tujuan penempatan 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BP2MI untuk mencabut semua keputusan Kepala Badan terkait dengan nilai (harga) struktur biaya penempatan PMI di seluruh negara tujuan penempatan, sehingga ketentuan penempatan PMI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Komisi IX DPR RI mendesak seluruh Kementerian/Lembaga terkait untuk selalu berkoordinasi dalam hal perlindungan dan penempatan PMI 	Rapat Dengar Pendapat Tanggal 8 Juni 2022

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Komisi IX DPR RI mendesak BP2MI untuk menghapus persyaratan kewajiban asuransi selain BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>5. Komisi IX DPR RI mendesak BP2MI untuk segera memproses seluruh tahapan calon PMI yang telah memenuhi syarat</p>	
4.	Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan.	Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan berpendapat bahwa perlunya merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.	Komisi IX DPR RI menerima dan mengapresiasi masukan dari Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan.	Audiensi Tanggal 9 Juni 2022

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	RUU Praktik Psikologi	31 Mei 2022 Rapat Panja	Membahas hasil uji publik RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi	Terdapat beberapa masukan dari para pemangku kepentingan psikologi di Indonesia, antara lain: 1. IPK Indonesia minta dikecualikan dari seluruh penganturan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi. 2. Perlu adanya penguatan mengenai pengaturan Pendidikan psikologi, khususnya tentang pengaturan psikolog sebagai ilmuan 3. Diusulkan agar STR dan SIP dilakukan secara terpisah.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Kemendikbudristek	2 Juni 2022 Raker Pembahasan Pagu Indikatif RAPBN TA 2023	Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman terhadap usulan pagu Indikatif	Pendalaman dilakukan dalam forum RDP

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2 Juni 2022 Raker Pembahasan Pagu Indikatif RABPN TA 2023	Komisi X DPR RI menyetujui usulan pagu Indikatif pada Kemendikbudristek RI sebesar Rp80.157.774.032.000,- (<i>Delapan Puluh Triliun Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah</i>) dan usulan tambahannya sebesar Rp10.152.241.202.000,- (<i>Sepuluh Triliun Seratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah</i>)	tanggal 3-5 Juni 2022
2	Kemenparekraf/ Baparekraf RI	2 Juni 2022 Raker Pembahasan Pagu Indikatif RABPN TA 2023	Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman terhadap usulan pagu Indikatif	Pendalaman dilakukan dalam forum RDP tanggal 6-7 Juni 2022
		2 Juni 2022 Raker Pembahasan Pagu Indikatif RABPN TA 2023	Komisi X DPR RI menyetujui usulan pagu Indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RABPN TA 2023 sebesar Rp3.316.208.395.000,- (<i>Tiga Triliun Tiga Ratus Enam Belas</i>)	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Miliar Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Sembilang Puluh Lima Ribu Rupiah) dan usulan tambahannya sebesar Rp952.096.897.000.- (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)</p>	
3	Kemenpora RI	2 Juni 2022 Raker Pembahasan Pagu Indikatif RAPBN TA 2023	Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman terhadap usulan pagu Indikatif	Pendalaman dilakukan dalam forum RDP tanggal 8-9 Juni 2022
		2 Juni 2022 Raker Pembahasan Pagu Indikatif RAPBN TA 2023	Komisi X DPR RI menyetujui usulan pagu Indikatif Kemenpora RI pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp1.665.093.157.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan usulan tambahannya sebesar Rp3.069.450.000.000,- (Tiga Triliun Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4	Perpusnas RI	2 Juni 2022 Raker Pembahasan Pagu Indikatif RAPBN TA 2023	Komisi X DPR RI menyetujui usulan pagu Indikatif Perpusnas RI pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp.675.883.905.980,- (<i>Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah</i>) dan usulan tambahannya sebesar Rp2.726.857.787.000,- (<i>Dua Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah</i>).	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, dan RDP dengan Kepala BPS	Rapat Kerja Pembahasan Asumsi Dasar dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023	Pendalaman pembahasan Asumsi Dasar dilakukan dalam Rapat Panja yang terbagi menjadi 3 (tiga) Panja, yaitu Panja Penerimaan, Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional, dan Panja Transfer Ke Daerah (TKD)	Rapat tanggal 31 Mei, 2 Juni, 6 Juni, dan 7 Juni 2022
2.	Menteri Keuangan RI	Rapat Kerja Pengantar RKA dan RKP Kementerian Keuangan dalam KEM PPKF Tahun 2023	1. Menteri Keuangan menyampaikan penjelasan mengenai RKA dan RKP Kementerian Keuangan dalam KEM PPKF Tahun 2023 2. Pendalaman materi mengenai RKA dan RKP Kementerian Keuangan akan dilakukan dalam Rapat dengan Eselon I Kementerian Keuangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9, 14, 15 Juni 2022	Rapat tanggal 8 Juni 2022

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi XI	Dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, Komisi XI DPR RI akan melakukan pembahasan terkait fungsi pengawasan dan fungsi anggaran (RKA dan RKP pada KEM PPKF Tahun 2023)	Rapat tanggal 19 Mei 2022
2.	Rapat Pimpinan dan Kapoksi	Verifikasi berkas Calon Anggota BPK RI	<p>Sesuai surat BPK Nomor : 01/S/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal pemberitahuan meninggalnya 1 (satu) Anggota BPK yang bernama Prof. Harry Azhar Azis, MA, PhD, CSFA, CFA, maka Komisi XI DPR RI telah melakukan pembukaan pendaftaran Calon Anggota BPK di media massa dan sampai penutupan pendaftaran, telah mendaftar 13 Calon Anggota BPK.</p> <p>Dari 13 Calon Anggota BPK tersebut, Pimpinan dan Kapoksi melakukan seleksi administrasi dan sebanyak 10 Calon Anggota BPK dinyatakan lolos administrasi.</p> <p>10 Calon Anggota BPK yang lolos seleksi administrasi di sampaikan ke DPD RI melalui Ketua DPR untuk di mintakan pertimbangan dan diumumkan di media massa untuk mendapatkan pendapat/tanggapan publik.</p>	Rapat tanggal 24 Mei 2022

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI (BALEG)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1	Badan Legislasi	<ol style="list-style-type: none">1. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. (tgl 31 Mei 2022, pukul 13.00 WIB).2. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. (tgl 6 Juni 2022, pukul 13.00 WIB).3. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. (tgl 7 Juni 2022, pukul 13.00 WIB).4. Rapat Panja Pleno Legislasi DPR RI dalam rangka Pemantauan dan Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (tgl 8 Juni 2022, pukul 13.00 WIB).5. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pengambilan keputusan atas hasil Harmonisasi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. (tgl 9 Juni 2022, pukul 13.00 WIB).6. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam rangka Pembahasan RUU tentang Pendidikan Kedokteran. (tgl 13 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB).7. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Prof. DR. Yulinah Trihadiningrum, M.App.Sc (Guru Besar Fakultas Teknik ITS), Dr. Sri Wahyono, S.Si, M.Si (Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih Badan Riset dan Inovasi Nasional), Ir. Guntur Sitorus, MT dan Ir. Sri Bebassari, M.Si (Indonesia Solid Waste Association/InSwa) dalam rangka pemantauan dan peninjauan atas UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (tgl 13 Juni, pukul 13.00 WIB).

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	BKSAP <i>SDGs Day</i> Malang	<p>Dalam rangka sosialisasi diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI menggelar BKSAP <i>SDGs Day</i> yang bertema "Memperkuat Diplomasi <i>Soft Power</i> Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya". Acara tersebut berlangsung pada hari Kamis (02/06/2022) di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Didepan Walikota dan Wakil Walikota Malang, serta mahasiswa, mahasiswi dan perwakilan Rektor dari Universitas Brawijaya dan Universitas Merdeka Malang, Dr. H. Mardani Ali Sera (F-PKS), selaku Wakil Ketua BKSAP menyampaikan bahwa pendidikan yang berkualitas mencakup aspek aksesibilitas dan kualitas yang memadai dan menargetkan masyarakat luas. Wakil Ketua BKSAP juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM.</p> <p>Untuk memastikan pendidikan yang berkualitas (SDG No.4), BKSAP mempunyai peran dalam menyuarakan pendidikan yang setara di forum-forum internasional, dan mendorong terciptanya peluang kerja sama dalam bidang riset bagi berbagai persoalan global.</p> <p>Dalam paparannya, Wakil Ketua BKSAP, Dr. H.</p>	2 Juni 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Mardani juga menjelaskan ruang lingkup diplomasi Parlemen, termasuk dalam kerangka kerja sama multilateral. Pada tahun 2022 ini, Parlemen turut serta menyukseskan G20 dengan menjadi tuan rumah persidangan P20 yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 – 7 Oktober 2022 di Jakarta, Indonesia.</p> <p>Berbagai hal mengemuka dalam sesi diskusi dan tanya jawab dengan civitas akademika, termasuk peran DPR RI secara menyeluruh. Tugas dan fungsi DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk pendidikan yang berkualitas juga dijelaskan secara komprehensif oleh Wakil Ketua BKSAP, Ir. H. A. Hafisz Tohir (F-PAN), dan anggota BKSAP lainnya, yaitu Arzeti Bilbina (F-PKB), Hj. Sakinah Aljufri (F-PKS), dan Didi Irawadi, S.H., LLM (F-PD). Diharapkan kegiatan ini dapat menjembatani kampus dengan DPR RI maupun pemerintah, sehingga terbuka kesempatan untuk berkolaborasi bagi mahasiswa dan mahasiswi.</p>	
2.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Korea Utara	<p>GKSB DPR RI - Parlemen Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) menggelar rapat internal guna membahas program kerja dan rencana kunjungan ke Pyongyang, Korea Utara. Rapat berlangsung secara tertutup di Ruang BKSAP, Nusantara III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (7/6/2022).</p> <p>Rapat dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen</p>	7 Juni 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Korea Utara Hamid Noor Yasin (F-PKS) dan dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Korea Utara Itet Tridjajati Sumarijanto (F-PDIP).</p> <p>Dalam Rapat tersebut juga disepakati untuk mengatur pertemuan dengan Dubes Korea Utara untuk membahas rencana kunjungan dan program kerja GKSB DPR RI - Parlemen Korea Utara. Rencananya kunjungan akan diagendakan pada awal Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 mendatang.</p>	
3.	KSB – BKSAP	<i>Virtual Meeting</i> GKSB DPR RI – Parlemen Qatar dengan Dubes RI di Doha, Qatar	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Qatar mengadakan <i>Virtual Meeting</i> dengan Dubes LBBP RI di Doha, Qatar, Y.M. Ridwan Hassan pada hari Selasa (07/06/2022).</p> <p>Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Qatar, Putra Nababan (F-PDIP) menyampaikan apresiasi atas kinerja perwakilan Indonesia di Doha, Qatar yang berkontribusi besar dalam peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia - Qatar.</p> <p>Pada pertemuan ini, Dubes RI di Qatar menyampaikan berbagai potensi kerja sama Indonesia - Qatar di berbagai bidang, antara lain kerja sama ekonomi, peternakan, ketenagakerjaan dan pariwisata. Disampaikan pula rencana kerja sama sosial budaya dalam kerangka <i>Qatar - Indonesia Year of Culture 2023</i> dan persiapan penyelenggaraan piala dunia di Qatar.</p>	7 Juni 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>Virtual Meeting</i> juga dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Qatar, Zainul Arifin (F-PGerindra), Saniatul Lativa (F-PG), dan Kurniasih Mufidayati (F-PKS).</p>	
4.	KSB - BKSAP	<p><i>Courtesy Call</i> GKSB DPR RI – Parlemen Tiongkok dengan Dubes Tiongkok</p>	<p>Grup Kerja Sama Antar Parlemen (GKSB) DPR RI - Parlemen Tiongkok menerima kunjungan kehormatan (<i>courtesy call</i>) Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia H.E. Lu Kang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (8/6/2022).</p> <p>Selaku pimpinan, Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok Puteri Komaruddin (F-Golkar) mengapresiasi pernyataan dukungan Tiongkok atas kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 tahun ini. Selanjutnya, Ketua GKSB juga mengharapkan dukungan dari NPC (Parlemen Tiongkok) dan Kedutaan Tiongkok dalam pelaksanaan <i>Parliament 20</i> (P20) yang akan digelar pada 6-7 Oktober 2022 mendatang.</p> <p>Duta Besar Lu Kang mendukung penuh pilihan tema P20 yang sangat dengan kondisi ketidakpastian global, yakni “<i>Stronger Parliament for Sustainable Recovery</i>”. Pihak Tiongkok sudah menerima undangan yang dikirimkan langsung oleh Ketua DPR RI untuk mengundang Ketua Parlemen Tiongkok. Dalam waktu dekat, pihaknya akan merekomendasikan pihak Beijing untuk dapat hadir di Jakarta.</p>	8 Juni 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Selain membahas mengenai agenda global, pertemuan juga membahas mengenai potensi kerja sama di bidang strategis lainnya. Pada sektor kesehatan, misalnya, saat ini pemerintah kedua negara tengah mengembangkan pusat riset vaksin sebagai upaya pengentasan pandemi Covid-19. Pertemuan juga dihadiri oleh Anggota GKSB DPR-Parlemen Tiongkok diantaranya Dr. H. Edi Wuryanto (F-PDIP), Sugiono (F-Gerindra) dan Daniel Johan (F-PKB).</p> <p>Sektor industri, terdapat potensi di sektor nikel mengingat Indonesia termasuk salah satu penghasil nikel terbesar dunia. Adaptasi perubahan iklim melalui transformasi menuju ekonomi hijau yang dikedepankan Pemerintah Indonesia, juga sejalan dengan kebijakan luar negeri Tiongkok, <i>Belt and Road Initiative</i>.</p> <p>Kedepannya, kedua negara berharap agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir, sehingga parlemen kedua negara dapat saling berkunjung guna memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin. Sebagaimana kesepakatan antara Ketua GKSB dan Dubes Tiongkok se usai pertemuan, "<i>People to people contact</i> masih menjadi satu hal yang sangat penting bagi hubungan diplomasi antar kedua negara"</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	KSB - BKSAP	Rapat Pimpinan ke-31 BKSAP DPR RI	<p>Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. (F-PGerindra) memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-31 yang berlangsung secara virtual pada Rabu, 8 Juni 2022.</p> <p>Rapim juga turut dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Gilang Dhielafararez, S.H.,LL.M (F-PDIP); Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD); Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) dan Dr. H. Mardani Ali Sera (F-PKS).</p> <p>Rapim membahas berbagai rencana program BKSAP di Masa Persidangan V, khususnya terkait persiapan penyelenggaraan <i>kick off 8th G-20 Parliamentary Speaker's Summit (P-20)</i> serta keikutsertaan DPR RI dalam sidang AIPACODD. Selain itu, rapat juga membahas mengenai rencana penyelenggaraan kegiatan <i>BKSAP Day</i> dan rencana pemindahan kantor <i>regional International Institute of Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)</i> ke Jakarta.</p> <p>Rapat juga membahas perkembangan aktivitas Grup Kerja Sama Bilateral dengan negara-negara sahabat, perkembangan kunjungan diplomasi dan kunjungan diplomasi perorangan guna memaksimalkan berbagai program kerja BKSAP di masa persidangan mendatang.</p>	8 Juni 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> GKSB DPR RI – Parlemen Kazakhstan	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Kazakhstan menerima kunjungan kehormatan (<i>courtesy call</i>) Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia H.E. Mr. Daniyar Sarekenov yang bertempat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (9/6/2022).</p> <p>Pertemuan dipimpin secara langsung oleh Ketua GKSB DPR-Parlemen Kazakhstan I Wayan Sudirta (F-PDIP) dan membahas sejumlah hal terkait upaya peningkatan hubungan kerja sama Indonesia-Kazakhstan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota GKSB DPR-Parlemen Kazakhstan Putu Supadma Rudana (F-PD) dan Muhammad Hidayat Nur Wahid (F-PKS).</p> <p>Hubungan bilateral antara Indonesia-Kazakhstan yang sudah terjalin selama hampir 30 tahun, memiliki banyak kesamaan. Baik Indonesia dan Kazakhstan merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan, Indonesia di ASEAN dan Kazakhstan di Asia Tengah.</p> <p><i>People-to-people relation</i> masih menjadi tumpuan penting dalam meningkatkan diplomasi antar kedua negara. GKSB DPR RI juga mengapresiasi kebijakan bebas visa dari Pemerintah Kazakhstan mulai Oktober 2019 lalu. Hal tersebut membuka potensi pariwisata antara warga negara Indonesia dan Kazakhstan.</p> <p>Dubes Kazakhstan mengapresiasi pertemuan yang berlangsung dan menyampaikan banyaknya potensi</p>	9 Juni 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kerja sama yang bisa ditingkatkan. Sebagai bagian dari <i>Eurasia Economic Union</i> (EAEU), Kazakhstan dapat menjadi "hub" bagi Indonesia untuk membangun bisnis dengan negara-negara Eurasia seperti Rusia, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan dan Kazakhstan.</p> <p>Sebagai informasi, Kazakhstan saat ini masih mendorong adanya penerbangan langsung Kazakhstan dan Indonesia sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan kedua negara. Pada Agustus 2022 mendatang sejumlah pelaku usaha dan maskapai penerbangan Kazakhstan direncanakan menggelar pertemuan dengan otoritas terkait untuk membahas opsi <i>direct flight</i> tersebut.</p>	
7.	KSB – BKSAP	<p><i>Working Lunch</i> Ketua BKSAP dengan Menteri Luar Negeri Bosnia & Herzegovina</p>	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Fadli Zon (F-PGerindra) mengadakan <i>Working Lunch</i> dengan Menteri Luar Negeri Bosnia dan Herzegovina, H.E. Mrs. Bisera Turkovic pada hari Sabtu (11/06/22).</p> <p><i>Working Lunch</i> membahas potensi peningkatan kerja sama bilateral Indonesia - Bosnia dalam berbagai bidang, di antaranya kerja sama dagang, investasi dan keamanan kawasan.</p> <p>Hadir pula dalam kegiatan tersebut, <i>Chief Assistant of Bilateral Department</i>, Mr. Ljubo Grković; <i>Chief of Cabinet</i>, Mr. Denis Hadžović; <i>Minister-Counselor</i>, Mr. Šaban Forić; <i>Advisor of the Cabinet</i>, Mr. Samir Karić;</p>	11 Juni 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			serta Duta Besar Bosnia dan Herzegovina untuk Indonesia, H.E. Mr. Mehmed Halilović, MA.	
8.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Oman	<p>GKSB DPR RI – Parlemen Oman melaksanakan rapat internal secara virtual dipimpin oleh Ketua GKSB, Prof. Dr. Zainuddin Maliki (F.PAN) pada Senin, 13 Juni 2022.</p> <p>Rapat membahas program kerja GKSB diantaranya rencana pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri dan Dubes Oman di Jakarta untuk mendapatkan masukan terkait perkembangan hubungan bilateral kedua negara, dan rencana kunjungan ke Parlemen Oman.</p> <p>Hadir dalam rapat tersebut Anggota GKSB, Endro Suswantoro Yahman (F.PDIP), Hasnuryadi Sulaiman (F.PG), Ishak Mekki (F.PD) dan Al Muzzammil Yusuf (F.PKS)</p>	13 Juni 2022

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan BI.	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	1. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2023 dan RKP Tahun 2023. A. Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2023 B. Pembentukan Panja-Panja (Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Penerimaan, Defisit dan Pembiayaan; Panja RKP dan Prioritas Anggaran; Panja Belanja Pusat: dan Panja Belanja Daerah)	Raker dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Mei 2022, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.
2.	Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	1. Pembahasan RKA K/L Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam dan Kemenko PMK dalam RAPBN Tahun 2023 2. Menyetujui Pagu Indikatif beserta usulan tambahan anggaran Kementerian-Kementerian Koordinator yang akan tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2023.	Raker dilaksanakan pada hari Senin, 6 Juni 2022, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.
3.	Menko Maritim dan Investasi	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara;	1. Pembahasan RKA K/L Kemenko Kemaritiman dan Investasi dalam RAPBN Tahun 2023	Raker dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Juni 2022, di

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		c. Kebijakan pemerintah	2. Menyetujui Pagu Indikatif beserta usulan tambahan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang akan tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2023	Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.
4	Menteri Keuangan dan K/L lainnya	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Membahas Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RAPBN 2023, dan menyepakati, sebagai berikut: 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro : A. Pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,9 persen B. Inflasi 2,0 – 4,0 persen C. Nilai tukar Rp14.300 – Rp14.800 D. Suku Bunga SUN 10 tahun 7,34 – 9,16 persen 2. Asumsi dan Indikator Sasaran Pembangunan : A. Tingkat kemiskinan 7,5 – 8,5 persen B. Rasio Gini 0,375 – 0,378 C. Tingkat pengangguran 5,3 – 6,0 persen D. Indeks Pembangunan Manusia 73,31 – 73,49 E. Nilai Tukar Petani 105 – 107 F. Nilai Tukar Nelayan 107 – 108	Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RAPBN 2023 dilaksanakan pada hari Senin, 13 Juni 2022, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	<p>Rapat BURT dengan Biro Protokol dan Manajemen PT.KAI, Rabu sd.Kamis, 1-3 Juni 2022</p> <p>Agenda: Pembahasan Pelaksanaan Keprotokolan untuk Anggota DPR RI di Stasiun Kereta</p>	<p>Lingkup pelayanan keprotokolan di Stasiun kereta meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyambutan kedatangan. 2. Penyediaan fasilitas ruang tunggu VIP. 3. Pelayanan turun dari kereta sampai ke kendaraan (termasuk ketersediaan lahan parkir khusus untuk kendaraan). 	
2.	<p>Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Senin, 6 Juni 2022</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nojel Sekjen tentang Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan I Tahun 2022. 2. Nojel Sekjen tentang RKA DPR RI Tahun 2023 berdasarkan Pagu Indikatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan I Tahun 2022 Rp.1.238.865.105.545,- (<i>Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah</i>) atau 22,82% dari pagu Rp.5.428.620.921.000,-. (<i>Lima Triliun Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah</i>). 2. Pagu Indikatif RKA DPR RI Tahun 2023 Rp.5.859.497.483.000,- (<i>Lima Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah</i>) masih terdapat kekurangan Rp.3.135.665.755.000,-. (<i>Tiga Triliun</i> 	

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
		<p><i>Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).</i></p>	
<p>3.</p>	<p>Rapat Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan I Tahun 2022 Satker Dewan dan Satker Setjen. Selasa, 7 Juni 2022. Agenda: Pendalaman tentang Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan I Tahun 2022 Satker Dewan dan Satker Setjen.</p>	<p>1. Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan I Tahun 2022 Satker Dewan Rp.979.826.813.113,- (<i>Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah</i>) atau 24,48% dari pagu Rp.4.002.036.941.000,-. (<i>Empat Triliun Dua Miliar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah</i>) 2. Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan I Tahun 2022 Satker Setjen Rp.259.038.292.432,- (<i>Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah</i>) atau 18,16% dari pagu Rp.1.426.583.980.000,-. (<i>Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah</i>).</p>	
<p>4.</p>	<p>Rapat Panja RKA DPR RI Tahun 2023 Satker Dewan dan Satker Setjen. Rabu, 8 Juni 2022. Agenda: Pendalaman tentang RKA DPR RI Tahun 2023 Satker Dewan dan Satker Setjen.</p>	<p>1. Pagu Indikatif RKA DPR RI Tahun 2023 Satker Dewan Rp.4.329.514.670.000,- (<i>Empat Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah</i>) masih terdapat kekurangan Rp.1.961.086.742.000,-. (<i>Satu Triliun</i></p>	

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
		<p><i>Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).</i></p> <p>2. Pagu Indikatif RKA DPR RI Tahun 2023 Satker Setjen Rp.1.529.982.813.000,- (<i>Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tigas Belas Ribu Rupiah</i>) masih terdapat kekurangan Rp.1.174.579.013.000,- (<i>Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Rupiah</i>).</p>	
5.	<p>Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Rabu, 8 Juni 2022 Agenda: Laporan Panja-Panja BURT</p>	-----	
6.	<p>Kunjungan Kerja Dalam Negeri:</p> <p>1. Semarang, Jawa Tengah, 9-11 Juni 2022.</p> <p>2. Surabaya, Jawa Timur, 12-14 Juni 2022</p>	<p>Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan di stasiun untuk:</p> <p>1. Memastikan pelaksanaan keprotokolan sesuai ketentuan peraturan.</p> <p>2. Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana di stasiun agar pelaksanaan keprotokolan berjalan lancar.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Institute for Development of Economics and Finance (INDEF); • Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); • Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM-UI); • Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI). 	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan INDEF, YLKI, LPEM UI dan CISDI dalam rangka mendapatkan masukan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau.	RDPU dilaksanakan, tanggal 31 Mei 2022
2.	<p>Melakukan pertemuan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemda Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat; • Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Barat; • Direktur Utama Peruri; • Jajaran Manajemen PT. H.M. Sampoerna/Philips Moris. 	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya melakukan pertemuan dengan Pemda Kabupaten Karawang, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Barat, Direktur Utama Peruri, dan Jajaran Manajemen PT. H.M. Sampoerna/ Philips Moris. Dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK terkait Cukai Hasil Tembakau.	Kunjungan Lapangan dilaksanakan tanggal 31 Mei s.d 02 Juni 2022

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
3.	Melakukan pertemuan dengan : <ul style="list-style-type: none"> • Pemda Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; • Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY; • Direktur Utama PT. Pura Group; • Jajaran Manajemen PT. Djarum. 	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya melakukan pertemuan dengan Pemda Kabupaten Kudus, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah & DIY, Direktur Utama PT. Pura Group, dan Jajaran Manajemen PT. Djarum. Dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK terkait Cukai Hasil Tembakau.	Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 06 s.d 08 Juni 2022
